



**Bapenda**

**RENCANA KERJA**  
**Renja**  
**2022**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax. (0534) - 32155  
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang  
Kalimantan Barat

[www.bapenda.ketapangkab.go.id](http://www.bapenda.ketapangkab.go.id)

### Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang tercurah kepada seisi alam ini sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dapat terselesaikan.


Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan jangka pendek yang disusun setiap tahun serta merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan sebagai indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Staregis (Renstra).

Renja yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dalam anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat mengarah pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dan akhirnya dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Pemerintah maupun Mitra Kerja.

Kami menyadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Renja ini masih banyak kekurangan serta kelemahan, oleh karena itu rancangan tersebut masih diperlukan perbaikan-perbaikan mengingat kedepan pada masa-masa yang akan datang perubahan terus terjadi seiring dengan kemajuan jaman

Akhirnya untuk semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi bantuan dalam penyusunan rencana awal rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Ketapang, Januari 2021  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Ketapang

  
Drs. P. DEVIE FRANTITO, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700411 199003 1 004



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.3.1. Maksud .....	9
1.3.2. Tujuan .....	9
3.1. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	13
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD .....	27
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	48
BAB V PENUTUP.....	50

**Daftar Tabel**

Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021 .....	14
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Ketapang.....	23
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	28
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	33
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kabupaten Ketapang .....	38
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Ketapang .....	43
Tabel 3.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Ketapang .....	45

**Daftar Gambar**

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja .....	3
----------------------------------------------	---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Awal 2022 Bapenda merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja Awal 2022 merupakan acuan Bapenda untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan FPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022;
- c. Renja Awal 2022 Bapenda merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

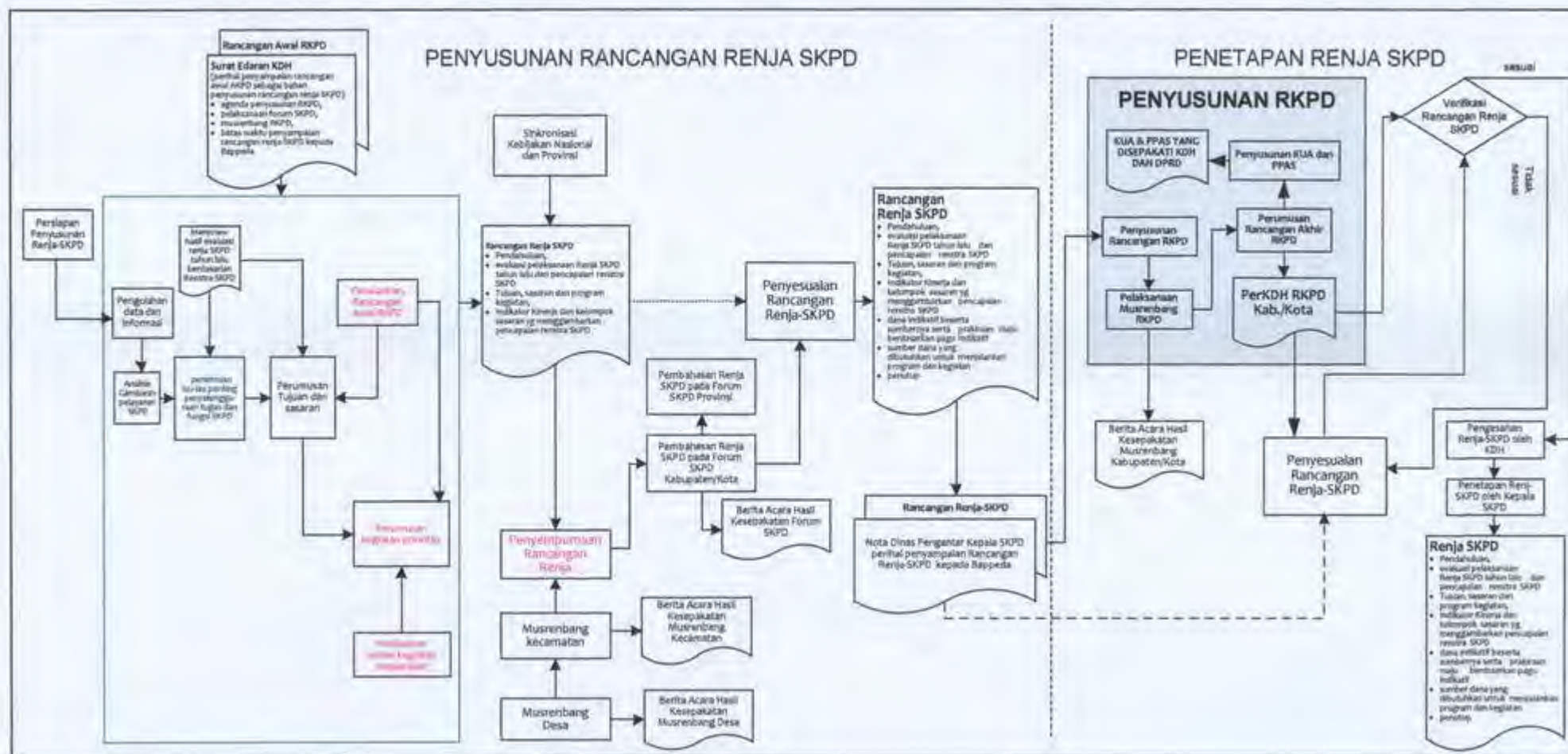
Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Awal 2022 SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- b. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- c. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Awal 2022 Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 berikut.







Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang, dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Adapun tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sekretariat dan masing-masing bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dan strategis dalam menggali sumber-sumber keuangan atau pendapatan daerah.

Sumber Keuangan atau Pendapatan Daerah berasal dari tiga sektor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah sendiri dan dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan/penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 2021-2026.
- b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2022.
- c. Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Sumber-Sumber Pendapatan.



## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 41).Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 4);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalakan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang di tahun 2022 melalui perencanaan kinerja tahunan. diantaranya :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu dalam Tahun Anggaran 2022 serta memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja dan mewujudkan Sinergitas Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renja 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :



- a. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk memasukan Program dan Kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2022 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan;
- d. Untuk menetapkan komitmen kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu indikatifnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun  $n-2$ ) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun  $n-1$ ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapenda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;



- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkannya antara rancangan awal RKPD dengan hasil Analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD, Program dan Kegiatan.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA**

#### **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

##### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022, kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2019 dengan 9 (Sembilan) program dan 56 (lima puluh enam) kegiatan, pada tahun 2020 dengan 9 (Sembilan) program dan 50 (lima puluh) kegiatan, serta pada tahun 2021 dengan 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Total Alokasi Anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 18.659.686.632,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 16.612.800.418,00 atau sebesar 89,03% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut dibawah ini :



Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5	6	7
5...	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18.659.686.632,00	16.612.800.418,00	89,03%
5.2...	KEUANGAN			18.659.686.632,00	16.612.800.418,00	89,03%
5.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.950.221.432,00	13.321.742.748,00	89,11%
5.2.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	218.200.000,00	200.875.040,00	92,06%
5.2.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	35.000.000,00	34.416.640,00	98,33%
5.2.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15.000.000,00	14.994.400,00	99,96%
5.2.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	9.876.700,00	98,77%
5.2.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	9.984.600,00	99,65%
5.2.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	9.999.250,00	99,99%
5.2.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lap	122.000.000,00	106.579.900,00	87,36%
5.2.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	16.200.000,00	15.043.550,00	92,86%
5.2.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.391.021.432,00	10.116.414.087,00	88,81%
5.2.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	10.996.221.432,00	9.721.837.807,00	88,41%
5.2.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	249.500.000,00	249.499.870,00	100,00%
5.2.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	125.300.000,00	125.198.000,00	99,92%
5.2.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	10.000.000,00	9.925.910,00	99,26%



1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	10.000.000,00	9.952.500,00	99,53%
5.2.01.203	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100 %	20.000.000,00	19.999.489,00	100,00%
5.2.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	20.000.000,00	19.999.489,00	100,00%
5.2.01.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 %	26.022.000,00	12.792.000,00	49,16%
5.2.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	26.022.000,00	12.792.000,00	49,16%
5.2.01.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	1.943.000.000,00	1.865.531.249,00	96,01%
5.2.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	34.981.875,00	99,95%
5.2.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	130 Paket	578.000.000,00	574.906.290,00	99,46%
5.2.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	37 Paket	420.000.000,00	419.151.640,00	99,80%
5.2.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dok	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00%
5.2.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Lap	900.000.000,00	826.591.444,00	91,84%
5.2.01.207	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %	510.990.000,00	354.878.600,00	69,45%
5.2.01.207.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	43.990.000,00	43.918.600,00	99,84%
5.2.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	125.000.000,00	124.960.000,00	99,97%
5.2.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	342.000.000,00	186.000.000,00	54,39%
5.2.01.208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	340.748.000,00	263.091.473,00	77,21%
5.2.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660 Lap	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
5.2.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	286.000.000,00	211.345.623,00	73,90%
5.2.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	44.748.000,00	44.745.850,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
5.2.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	500.240.000,00	488.160.810,00	97,59%
5.2.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	150.240.000,00	149.916.000,00	99,78%
5.2.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	275.000.000,00	263.324.810,00	95,75%
5.2.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	108 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%
5.2.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	35.000.000,00	34.920.000,00	99,77%
5.2.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			3.709.485.200,00	3.291.057.670,00	88,72%
5.2.04.201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	3.709.485.200,00	3.291.057.670,00	88,72%
5.2.04.201.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	200.000.000,00	123.201.700,00	61,60%
5.2.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	110.000.000,00	40.491.880,00	36,81%
5.2.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7 Lap	301.220.000,00	250.275.569,00	83,09%
5.2.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	333.200.000,00	301.275.000,00	90,42%
5.2.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	734 Lap	250.000.000,00	231.813.232,00	92,73%
5.2.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Lap	729.000.000,00	663.555.103,00	91,02%
5.2.04.201.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 OP	200.000.000,00	197.209.550,00	98,60%
5.2.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	136.956 Dok	250.000.000,00	226.836.678,00	90,73%
5.2.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	300.000.000,00	271.199.900,00	90,40%
5.2.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20 Dok	150.000.000,00	146.261.000,00	97,51%
5.2.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	270.000.000,00	269.850.000,00	99,94%

1	2	3	4	5	6	7
5.2.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Dok	139.428.000,00	133.544.308,00	95,78%
5.2.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	150 Dok	139.352.000,00	138.991.500,00	99,74%
5.2.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	337.265.200,00	296.552.250,00	87,93%



Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Realisasi program/kegiatan yang “Tidak” memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Sub Kegiatan yaitu :
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar 49,16%;
  - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 36,81%;
- b. Realisasi program/kegiatan yang “Telah” memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Sub Kegiatan yaitu :
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 98,33%
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 99,96%
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar 98,77%
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar 99,65%
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebesar 99,99%
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar 87,36%
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 92,86%
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 88,41%
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar 99,92%
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebesar 99,26%
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebesar 99,95%
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 99,95%
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 99,46%

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 99,80%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 99,00%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 91,84%
- Pengadaan Meubel sebesar 99,84%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 99,97%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 54,39%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 70,00%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 73,90%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 99,78%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 95,75%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 99,77%
- Perencanaan pengelolaan pajak daerah sebesar 61,60%
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah sebesar 83,09%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebesar 90,42%
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebesar 92,73%
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebesar 91,02%
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 98,60%
- Penetapan Wajib Pajak Daerah sebesar 90,73%
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebesar 90,40%
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar 97,51%



- Penagihan Pajak Daerah sebesar 99,94%
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebesar 95,78%
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar 99,74%
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebesar 87,93%
- c. Realisasi program/ kegiatan yang “Melebihi” target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu :
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 100%
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 100%
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 100%
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 100%
- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu :
  - Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Adapun permasalahan pada sub kegiatan ini disebabkan tidak tercapainya alokasi biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi;
  - Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Adapun permasalahan pada sub kegiatan ini disebabkan tidak tercapainya alokasi biaya Perjalanan Dinas tidak sepenuhnya terserap, hal ini disebabkan adanya himbauan untuk tidak melakukan Perjalanan Dinas dikarenakan penyebaran Covid-19 pada saat itu cukup tinggi;
  - Komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
  - Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;

- Ketersediaan sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
  - Ketersediaan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara kualitas maupun kuantitas;
  - Ketersediaan sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Pendapatan daerah;
  - Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder; dan
  - Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah serta Realisasi pelaksanaan kinerja program/ kegiatan sangat berpengaruh terhadap capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah. Realisasi pelaksanaan kinerja program/kegiatan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Renstra 2021-2026. Terpenuhi atau tidak tercapainya target capaian program/kegiatan menunjukkan keberhasilan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan yaitu :



- Menyediakan/ mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meningkatkan kualitas SDM khususnya ASN yang memiliki kompetensi khusus dibidang pendapatan daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui mengikutsertakan personil Badan Pendapatan Daerah pada pendidikan dan khususnya dalam bidang pengelolaan Pendapatan daerah
- Menyediakan sarana kerja yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meningkatkan tingkat akselerasi terhadap berbagai perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait Pendapatan daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

**Tabel 2.2 (T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang**

Name Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun .....	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target program dan kegiatan  (Renja OPD tahun n-1) tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					(n-2)	tahun (n-2)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0 -	0 -	100 %	89,11 %	89,11%	100 %	189,1	#DIV/0!
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 -	0 -	100 %	92,06 %	92,06%	100 %	192,1	#DIV/0!
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	8 Dok	7,87 Dok	98,33%	11 Dok	19,9	1987%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,00 Dok	99,96%	1 Dok	3,0	300%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0,99 Dok	98,77%	1 Dok	3,0	299%
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,00 Dok	99,65%	1 Dok	3,0	300%
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,00 Dok	99,99%	1 Dok	3,0	300%
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	3 Dok	2,62 Dok	87,36%	1 Dok	4,6	462%
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1,86 Dok	92,86%	1 Dok	3,9	386%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 %	0 %	100 %	88,81 %	88,81%	100 %	188,8	#DIV/0!
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok	0 Dok	12 Dok	10,61 Dok	88,41%	1 Dok	11,6	1161%



1	2	3	4	5	6	7,6	8=(7/6)	9	10=(3+7+9)	11=(10/4)
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	0 Dok	12 Dok	12,00 Dok	100,00%	27 Dok	39,0	3900%
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	0 Dok	12 Dok	11,99 Dok	99,92%	24 Dok	36,0	3599%
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0,99 Dok	99,26%	1 Dok	2,0	199%
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1,00 Dok	99,53%	1 Dok	2,0	200%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 %	0 %	100 %	100,00 %	100,00%	100 %	200,0	#DIV/0!
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dok	0 Dok	2 Dok	2,00 Dok	100,00%	8 Dok	10,0	125%
1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	0 %	0 %	100 %	49,16 %	49,16%	100 %	149,2	#DIV/0!
1.4.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Org	0 Org	10 Org	4,92 Org	49,16%	10 Org	14,9	746%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 %	0 %	100 %	96,01 %	96,01%	100 %	196,0	#DIV/0!
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Bln	0 Bln	12 Bln	11,99 Bln	99,95%	12 Bln	24,0	171%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Org	0 Org	130 Org	129,30 Org	99,46%	130 Org	259,3	2161%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	37 Jenis	0 Jenis	37 Jenis	36,93 Jenis	99,80%	37 Jenis	73,9	200%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150 Eks	0 Eks	150 Eks	148,50 Eks	99,00%	150 Eks	298,5	199%
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Kali	0 Kali	64 Kali	58,78 Kali	91,84%	64 Kali	122,8	192%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 %	0 %	100 %	69,45 %	69,45%	100 %	169,4	#DIV/0!
1.6.4	Pengadaan Meubel	Jumlah Peralatan Meubel	60 Unit	0 Unit	60 Unit	59,90 Unit	99,84%	50 Unit	109,9	183%
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	0 Unit	6 Unit	6,00 Unit	99,97%	6 Unit	12,0	200%
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	0 Bln	12 Bln	6,53 Bln	54,39%	7 Bln	13,5	113%



1	2	3	4	5	6	7,0	8=(7/5)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	0 %	100 %	77,21 %	77,21%	100 %	177,2	#DIV/0!
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 Lbr	0 Lbr	1.660 Lbr	1.162,00 Lbr	70,00%	2 Lbr	1164,0	9700%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	3 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	2,22 Jenis	73,90%	3 Jenis	5,2	174%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	0 Bln	12 Bln	12,00 Bln	100,00%	12 Bln	24,0	200%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	0 %	0 %	100 %	97,59 %	97,59%	100 %	197,6	#DIV/0!
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1,00 Unit	99,78%	1 Unit	2,0	200%
1.8.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	0 Bln	12 Bln	11,49 Bln	95,75%	12 Bln	23,5	196%
1.8.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Unit	0 Unit	108 Unit	108,00 Unit	100,00%	50 Unit	158,0	146%
1.8.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	0 Unit	38 Unit	37,91 Unit	99,77%	38 Unit	75,9	200%
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		0 %	0 %	100 %	88,72 %	88,72%	100 %	188,7	#DIV/0!
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	0 %	0 %	100 %	88,72 %	88,72%	100 %	188,7	#DIV/0!
3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola	8 Dok	0 Dok	1 Dok	0,62 Dok	61,60%	1 Dok	1,6	20%
3.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	6 Dok	0 Dok	2 Dok	0,74 Dok	36,81%	2 Dok	2,7	46%
3.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	240 Keg	0 Keg	7 Keg	5,82 Keg	83,09%	1000 Keg	1005,8	419%
3.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 Aplikasi	0 Aplikasi	2 Aplikasi	1,81 Aplikasi	90,42%	3 Aplikasi	4,8	120%
3.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	734 OP	0 OP	734 OP	680,60 OP	92,73%	800 OP	1480,6	202%



1	2	3	4	5	6	7,8	9=(7/8)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 Pajak Daerah	0 Pajak Daerah	11 Pajak Daerah	10,01 Pajak Daerah	91,02%	1 Pajak Daerah	11,0	1101%
3.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0,99 Dok	98,60%	1 Dok	2,0	199%
3.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	136956 OP	0 OP	136.956 OP	124.266,58 OP	90,73%	138.000,00 OP	262266,6	191%
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0,90 Dok	90,40%	1 Dok	1,9	190%
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	20 Kec	0 Kec	20 Kec	19,50 Kec	97,51%	20 Kec	39,5	198%
3.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	11 Dok	0 Dok	1 Dok	1,00 Dok	99,94%	20 Dok	21,0	191%
3.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	250 WP	0 WP	100 WP	95,78 WP	95,78%	100 WP	195,8	78%
3.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	250 WP	0 WP	150 WP	149,61 WP	99,74%	150 WP	299,6	120%
3.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	1 Dok	0 Dok	1 Dok	0,88 Dok	87,93%	25 Dok	25,9	2588%

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai berikut :



Tabel 2.3 (T-C.30)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).	-	-	6%	7%	8%	9%	10,96%	10,76%	10,86%	10,96%	

Pengukuran capaian indikator kinerja utama meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Pada tahun 2022 terdapat Sasaran yaitu : **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah** dengan Indikator Sasaran :

**“Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang.”**

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampak yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, serta telaahan RPJMD Ketapang Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Permasalahan :

Secara keseluruhan permasalahan pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diantaranya :

1. Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum ter-update
2. Penerapan sanksi hukum belum maksimal
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4. Terbatasnya jumlah ASN di Bapenda
5. Kapabilitas sumber daya ASN di Bapenda masih terbatas
6. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang masih sangat rendah
7. Kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Ketapang yang menurun pasca pandemi covid 19 berkepanjangan.



Solusi :

1. Melakukan survey serta kajian berkaitan dengan peningkatan pelayanan masyarakat agar berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pajak
2. Melakukan kajian dalam rangka menggali data potensi masing-masing Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Penyusunan SOP yang jelas dalam setiap pelayanan PDRD, mengaktifkan tim saber pungli, membentuk Tim Sita yang terdiri dari Pol PP, Kejaksaan dan pihak terkait.
5. Secara konsisten dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Daerah bagi pembangunan Kabupaten Ketapang dengan mengikutsertakan instansi horizontal dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Online satu pintu dengan sistem yang di miliki oleh Bapenda, sehingga jika ada perubahan data, dapat langsung di update
7. Melakukan identifikasi isu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Kemudian membuat time schedule terkait pemecahan isu tersebut.
8. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik lingkup daerah maupun propinsi.
9. Memberikan stimulus WP berkenaan pembayaran pajak dimasa pandemi virus Covid-19 berupa penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak bagi wajib pajak atas tunggakan Fajak Daerah serta menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Secara Formulasi dapat digambarkan sebagai berikut dibawah ini :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Data objek pajak dan subjek pajak belum di <i>-update</i>
		Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal
		Belum optimalnya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
		Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam menilai data perpajakan
		Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan pajak
	Kesadaran wajib pajak rendah	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
		Belum optimalnya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak
		Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Sarana dan prasarana retribusi kurang memadai
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi
		Belum optimalnya koordinasi dengan OPD penghasil

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan Akhir dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Perbandingan antara rancangan Akhir usulan RKPD tahun 2021 dengan hasil analisa kebutuhan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

**Tabel 2.4 (T.C.31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda			14.473.256.083,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bapenda			14.649.256.083,00	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	218.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	218.200.000,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	35.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15.000.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	122.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	122.000.000,00	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	16.200.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	16.200.000,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.352.056.083,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.352.056.083,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok	10.957.256.083,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dok	10.957.256.083,00	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	264.800.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	264.800.000,00	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	110.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	110.000.000,00	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dok	10.000.000,00	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	20.000.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dok		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dok	20.000.000,00	
1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	50.000.000,00	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	50.000.000,00	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Teraksennanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Org	50.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Teraksennanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Org	50.000.000,00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.893.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.893.000.000,00	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Item	30.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Item	30.000.000,00	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 Bln	578.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 Bln	578.000.000,00	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	37 Jenis	375.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	37 Jenis	375.000.000,00	
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150 Eks	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150 Eks	10.000.000,00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Kali	900.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Kali	900.000.000,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	358.000.000,00	
1.6.1	Pengadaan Meubel	Bapenda	Tersediannya Peralatan Meubelair	60 Unit	45.000.000,00	Pengadaan Meubel	Bapenda	Tersediannya Peralatan Meubelair	60 Unit	45.000.000,00	
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	125.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	125.000.000,00	
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	30.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	188.000.000,00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325.000.000,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Terkelolanya Jasa Surat Menyurat	12 Bln	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Terkelolanya Jasa Surat Menyurat	12 Bln	10.000.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	3 Jenis	275.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	3 Jenis	275.000.000,00	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	40.000.000,00	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	435.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100 %	435.000.000,00	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Tersediannya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	150.000.000,00	
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	225.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	225.000.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Bln	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108 Bln	30.000.000,00	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38 Unit	30.000.000,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Bapenda			20.000.000,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Bapenda				Adanya Penyesuaian Program
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	20.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %		Adanya Penyesuaian Kegiatan
	Rakonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bapenda	Tertaksana Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Bln	20.000.000,00	Rakonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bapenda	Tertaksana Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Bln		Adanya Penyesuaian Kegiatan Sub
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Bapenda			3.709.465.200,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Bapenda			3.709.465.200,00	
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	3.709.465.200,00	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	100 %	3.709.465.200,00	
3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola	6 Dok	200.000.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola	6 Dok	200.000.000,00	
3.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	6 Dok	110.000.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	6 Dok	110.000.000,00	
3.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	240 Org	100.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	240 Org	250.000.000,00	
3.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 Jenis Pajak	197.200.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	4 Jenis Pajak	197.200.000,00	
3.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	734 WP	250.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	734 WP	250.000.000,00	
3.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 Dok	315.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 Dok	365.000.000,00	
3.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Dok	200.000.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1 Dok	200.000.000,00	
3.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	136.056 OP	250.000.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	136.056 OP	250.000.000,00	
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 Dok	300.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	1 Dok	300.000.000,00	
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	20 Kec	150.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	20 Kec	150.000.000,00	
3.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	11 Jenis Pajak	270.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	11 Jenis Pajak	270.000.000,00	
3.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	250 Dok	180.000.000,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	250 Dok	180.000.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	250 Dok	150.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	250 Dok	150.000.000,00	
3.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	1 Dok	337.265.200,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	1 Dok	337.265.200,00	
JUMLAH ANGGARAN					17.502.721.283,00					18.358.721.283,00	

## **2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah. Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, mendapat Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 18.358.721.283,-

Berikut Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :



**Tabel. 2.5 (T-C.32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan**  
**Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Bapenda</b>		<b>14.649.256.083,00</b>	
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>218.200.000,00</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD	10.000.000,00	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	122.000.000,00	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.200.000,00	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.352.056.083,00</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.957.256.083,00	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.800.000,00	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000,00	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Terkoordinasi dan tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000,00</b>	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bapenda	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.893.000.000,00</b>	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bapenda	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bapenda	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	578.000.000,00	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bapenda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	375.000.000,00	



1	2	3	4	5	6
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bapenda	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000,00	
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>356.000.000,00</b>	
1.6.1	Pengadaan Meubel	Bapenda	Tersedianya Peralatan Meubel	45.000.000,00	
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000,00	
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.000.000,00	
1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>325.000.000,00</b>	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bapenda	Terkelolanya Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	275.000.000,00	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.000.000,00	
1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah</b>	<b>435.000.000,00</b>	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000,00	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Bapenda</b>		-	
2.1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	-	
	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bapenda	Terlaksana Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Bapenda</b>		<b>3.709.465.200,00</b>	
3.1	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Bapenda</b>	<b>Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>3.709.465.200,00</b>	
3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola	200.000.000,00	
3.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Bapenda	Jumlah dokumen laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	110.000.000,00	
3.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	250.000.000,00	
3.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	197.200.000,00	
3.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	250.000.000,00	



1	2	3	4	5	6
3.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	865.000.000,00	
3.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000,00	
3.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	250.000.000,00	
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah	300.000.000,00	
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	150.000.000,00	
3.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah	270.000.000,00	
3.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	180.000.000,00	
3.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	150.000.000,00	
3.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	337.265.200,00	
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>				<b>18.358.721.283,00</b>	

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokrat, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi :

1. Industri
2. Parawisata
3. Ketahanan pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Tranformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
9. Reformasi Kesehatan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD tahun 2022 agar diselaraskan guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasasn produksi dengan kawasan distribusi,



- mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Karya;
  4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
  5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah terkait dengan arah kebijakan ke 1 (satu) dan 4 (empat). Arah kebijakan “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global” serta arah kebijakan “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” sasaran kegiatan yang menjadi prioritas dengan dasar penetapan efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran kegiatan tersebut yaitu :

- a. Perluasan Implementasi E-Government yang terintegrasi;
- b. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan;
- c. Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM aparatur; dan
- d. Peningkatan Integritas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk mewujudkan arah kebijakan.

“Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi” melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan, Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 merupakan implementasi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan monitoring pengelolaan pendapatan daerah yang akomodatif, aspiratif dan fleksibel sebagai acuan dalam peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya hasil kajian dan pengembangan potensi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pendapatan yang sesuai dengan potensi daerah.
4. Terlaksananya perumusan berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
5. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang didukung oleh sumber Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan (*capable*) di dalam pengelolaan pendapatan daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.

**Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022  
Kabupaten Ketapang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	100%	8%



### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

**Tabel. 3.7 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				13.725.057.712,00				16.153.500.000,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	185.000.000,00	APBD	-	100 %	185.000.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11 Dok	35.000.000,00			8 Dok	35.000.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	10.000.000,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	10.000.000,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	10.000.000,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	10.000.000,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dok	100.000.000,00			12 Lap	100.000.000,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	10.000.000,00			12 Lap	10.000.000,00
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	11.435.257.712,00	APBD	-	100 %	11.959.817.000,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Dok	11.015.257.712,00			46 Org/Blh	11.539.817.000,00
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		27 Dok	250.000.000,00			12 Dok	250.000.000,00
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		24 Dok	140.000.000,00			12 Dok	140.000.000,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dok	10.000.000,00			1 Lap	10.000.000,00
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Dok	10.000.000,00			12 Lap	10.000.000,00
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	20.000.000,00	APBD	-	100 %	26.620.000,00
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD		8 Dok	20.000.000,00			1 Lap	26.620.000,00
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	60.000.000,00	APBD	-	100 %	177.350.000,00
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakiaian Dinas Boserta Atribut Kelengkapannya		-	-			1 Paket	100.000.000,00
1.4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	10.000.000,00			1 Dok	11.000.000,00
1.4.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10 Org	50.000.000,00			10 Org	56.550.000,00
1.5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda	100 %	1.390.000.000,00	APBD	-	100 %	1.228.240.000,00
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bn	20.000.000,00			1 Paket	29.930.000,00
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor		130 Org	500.000.000,00			1 Paket	325.000.000,00
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		37 Jenis	300.000.000,00			1 Paket	450.000.000,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		150 Eks	10.000.000,00			150 dok	13.310.000,00
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64 Kali	500.000.000,00			64 lap	400.000.000,00
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bapenda	100 %	109.800.000,00	APBD	-	100 %	1.668.293.000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2 Unit	950.093.000,00
1.6.4	Pengadaan Meubel	Jumlah Perakitan Meubel		50 Unit	30.000.000,00			60 Unit	59.895.000,00
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6 Unit	49.800.000,00			2 Paket	450.000.000,00
1.6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7 Unit	30.000.000,00			6 Unit	166.375.000,00
1.6.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5 Unit	39.930.000,00
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	100 %	315.000.000,00	APBD		100 %	341.550.000,00
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat		2 Dok	10.000.000,00			1 Lap	13.310.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah		3 Jenis	275.000.000,00			12 Lap	275.000.000,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bln	30.000.000,00			4 Lap	53.240.000,00
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Bapenda	100 %	270.000.000,00	APBD		100 %	570.430.000,00
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	40.000.000,00			1 Unit	70.500.000,00
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44 Unit	120.000.000,00			44 Unit	125.000.000,00
1.8.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bln	50.000.000,00			108 Unit	185.000.000,00
1.8.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50 Bln	30.000.000,00			108 Unit	150.000.000,00
1.8.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38 Unit	30.000.000,00			38 Unit	39.930.000,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.685.000.000,00				2.670.000.000,00
3.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda	100 %	2.685.000.000,00	APBD		100 %	2.670.000.000,00
3.1.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan pajak daerah yang dikelola		1 Dok	150.000.000,00			1 Dok	150.000.000,00
3.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan laporan perkembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah		2 Dok	50.000.000,00			1 Dok	50.000.000,00
3.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		1000 Org	200.000.000,00			5 Lap	200.000.000,00
3.1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		3 Aplikasi	180.000.000,00			3 Unit	180.000.000,00
3.1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah		800 OP	250.000.000,00			1 Lap	200.000.000,00
3.1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah		1 Dok	315.000.000,00			12 Lap	300.000.000,00
3.1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		1 Dok	200.000.000,00			2500 OP	200.000.000,00
3.1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah		138000 Tempat	250.000.000,00			1 Dok	250.000.000,00
3.1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah pelayanan dan konsultasi pajak daerah		1 Dok	250.000.000,00			800 Layanan	250.000.000,00
3.1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah		20 Kec	120.000.000,00			6 Dok	120.000.000,00
3.1.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan pajak daerah		20 Kec	270.000.000,00			1 Dok	270.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah		100 Dok	150.000.000,00			1 Dok	150.000.000,00
3.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah		150 Dok	50.000.000,00			100 Dok	50.000.000,00
3.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah		25 Dok	250.000.000,00			1 lap	250.000.000,00
3.1.15	Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		- -	-			1 lap	50.000.000,00
TOTAL ANGGARAN					16.410.057.712,00				18.825.500.000,00



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh satuan kerja mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, *leasing*, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi.

Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta tujuan dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022.

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, maka penetapan prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Harapan yang hendak diraih dari penyusunan Renja ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja pemerintah daerah semakin meningkat dan berkualitas. Renja juga diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang diwaktu yang akan datang.